



Volume 13 Nomor 1 Maret 2017

---

**ISSN: 1858 – 3903**

Diterbitkan oleh Biro Penerbit Planologi Undip

Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota merupakan jurnal ilmiah untuk pertukaran gagasan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota. Jurnal ini terbit 4 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

**KETUA DEWAN EDITOR**

Iwan Rudiarto

**EDITOR**

Wido Prananing Tyas

Jawoto Sih Setyono

Wiwandari Handayani

**SEKRETARIAT EDITOR**

Farida Nur Hadini Nuzulia

Vulkan Raditya Nugraha

**DESIGN GRAFIS**

Arief Triantono

Parjono

**ALAMAT REDAKSI**

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Gedung A Lantai 3 – Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota

Kampus Undip Tembalang, Semarang 50275, Indonesia

Telp. (024) 764 86820 Fax. (024) 764 86821

email: [jurnal.pwk@undip.ac.id](mailto:jurnal.pwk@undip.ac.id)

website: [ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk](http://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk)

## DAFTAR ISI

<b>PENGARUH KEBERADAAN ALUN-ALUN SEBAGAI RUANG PUBLIK TERHADAP KARAKTER KAWASAN PUSAT KOTA DI KOTA KISARAN .....</b>	<b>1-13</b>
<i>Anton Sutresno, Bambang Setioko</i>	
<b>PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN DI KABUPATEN REMBANG.....</b>	<b>14-26</b>
<i>Dian Heryani , Fadjar Hari Mardiansjah</i>	
<b>PENGARUH KAWASAN MIGAS TERHADAP POLA DAN STRUKTUR RUANG PERKOTAAN KECAMATAN KAPAS, KABUPATEN BOJONEGORO.....</b>	<b>27-43</b>
<i>Dwi Ratna Putri Purnamaningsih</i>	
<b>KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PASAR PEMALANG KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>44-55</b>
<i>Eko Wijayanto</i>	
<b>ANTARA POTENSI DAN KENDALA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SUMATERA BARAT.....</b>	<b>56-66</b>
<i>Henny Ferniza</i>	
<b>PERAN SERTA STAKEHOLDER DALAM MEMBENTUK CITY BRANDING THE SPIRIT OF JAVA di JALAN SLAMET RIYADI SURAKARTA .....</b>	<b>67-82</b>
<i>Herdyanah Mustika</i>	
<b>KONSEP REVITALISASI PELABUHAN JUWANA KABUPATEN PATI.....</b>	<b>83-99</b>
<i>Indah Saraswati, Imam Buchori</i>	
<b>KARAKTERISTIK ELEMEN SISTEM PARIWISATA EKOWISATA DESA WISATA NGLANGGERAN DAN WISATA DESA PADA DESA WISATA PENTINGSARI .....</b>	<b>100-113</b>
<i>Novia Purbasari , Asnawi Manaf</i>	
<b>CONTINUITY OF LOCAL IDENTITY IN THE MULTICULTURAL NEIGHBORHOOD</b>	<b>114-124</b>
<i>R Clarrio Dimassetya Jaya, Wisnu Pradoto</i>	
<b>PENGARUH EVENT LOVELY TORAJA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA.....</b>	<b>125-137</b>
<i>Yohanis Bara Lotim , Maya Damayanti</i>	

# Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Di Kabupaten Rembang

Dian Heryani<sup>1</sup>, Fadjar Hari Mardiansjah<sup>2</sup>

Diterima : 27 September 2016

Disetujui : 01 Maret 2017

## ABSTRACT

During this time, poverty alleviation program specifically for economic empowerment believed to be successful in decreasing the rate of poverty and developing asset. But in fact, it is indicated could not guarantee the poors to come out from their conditions. Because there is uneffectiveness indication in that poverty alleviation, it is needed to observe potential of economic empowerment in rural poverty alleviation. The purpose of this research is to know the potential of economic empowerment including its pattern of the relationship and benefit in rural poverty alleviation in Rembang Regency. Analysis in the research including distribution frequency statistic and descriptive analysis. This research uses 155 samples of economic empowerment beneficiaries of PNM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (credit loan for woman) scattered across the Sub district Bulu and Kaliore as the research areas. Based on the results of the analysis, the economic empowerment in Rembang Regency can not reach out for poverty alleviation in rural areas. It also can not be used as the primary tool in rural poverty alleviation. This is because in program development, most of beneficiaries are coming from unpoors. Besides, their efforts of industry can not reach the poors to come out from the poverty itself. Meanwhile, various obstacles also triggered micro industry of the poors remain marginalized.

**Keywords :** Economic Empowerment, Pattern of the relationship, benefit and Potential of Program, Rural Poverty Alleviation.

## ABSTRAK

Program penanggulangan kemiskinan khususnya pemberdayaan ekonomi selama ini dinilai berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengembangan aset. Namun faktanya terindikasi belum dapat menjamin rumah tangga miskin untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Karena adanya peluang ketidakefektifan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, perlu ditinjau pola kemampuan program pemberdayaan ekonomi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kemampuan bantuan pemberdayaan ekonomi melalui pengkajian pola hubungan dan manfaat program tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang. Teknik analisis mencakup analisis statistik distribusi frekuensi dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 155 sampel penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi yang tersebar di Kecamatan Bulu dan Kaliore, Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil analisis, pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang kurang mampu menjangkau pada tujuan penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi ini juga masih bersifat preventif dan tidak bisa dijadikan alat utama dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan, khususnya di Kabupaten Rembang. Hal ini karena pada perkembangan program, sebagian besar penerima manfaat justru berasal dari kelompok non miskin, yang mana usahanya kurang mampu menyerap tenaga dari keluarga miskin. Sementara itu, berbagai kendala yang ada menyebabkan tetap terpinggirkannya usaha/ industri mikro dari kelompok miskin.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan ekonomi, Pola Hubungan, Manfaat dan Kemampuan Program, Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.

<sup>1</sup>DPU Kabupaten Rembang , Jl. P Diponegoro No.101 Rembang 59211

Kontak Penulis : ianheryabrisam@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, persoalan rendahnya kesejahteraan yang bermuara pada kemiskinan bukan karena seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, tetapi lebih dipicu oleh terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Terjadi penyimpangan distribusi yang berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan. Seperti yang dikemukakan Mubyarto (2002), bahwa orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya.

Lambannya progres dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota Indonesia berlawanan dengan fakta dimana pemerintah telah melaksanakan begitu banyak program penanggulangan kemiskinan. Beberapa diantaranya hanya menjadi program percobaan atau sebagai proses pembelajaran dalam mengentaskan kemiskinan. Paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini bahwa kebijakan atau program akan dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam upaya melawan kemiskinan (Dillon dalam Mubyarto, 2002). Terkait dengan hal itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bagian pokok dari strategi pengurangan kemiskinan.

Studi kasus di Kabupaten Rembang karena daerah di wilayah ujung timur Jawa Tengah ini sejak tahun 2008 dimulainya PNPM Mandiri Perdesaan hingga saat ini ternyata masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, bahkan diatas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (15,76%). Tahun 2013 lalu, kemiskinan masih berada di angka 20,97% atau sekitar 128.000 jiwa. Sementara itu, mengacu pada Badan Pusat Statistik (September 2013), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah adalah 14,44%. Pemberdayaan ekonomi melalui simpan pinjam perempuan yang telah ada sejak dimulainya PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Rembang, belum menjamin peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin/ hampir miskin. Faktor yang diduga menjadi penyebabnya, yaitu kurangnya ketrampilan, kurangnya dukungan dalam mengembangkan usaha yang baru dirintis baik dalam hal manajemen maupun pemasaran, dorongan memanfaatkan simpan pinjam perempuan untuk modal usaha produktif kalah oleh pola konsumtif kebutuhan rumah tangga. Faktor yang lain yaitu kurang tepatnya sasaran simpan pinjam perempuan untuk rumah tangga yang telah memiliki usaha ekonomi kuat demi pengembangan asset simpan pinjam.

Karena adanya peluang muncul ketidakefektifan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, perlu ditinjau bagaimana kemampuan (pola hubungan dan manfaat) program pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan. Pola hubungan dan manfaat pemberdayaan ekonomi selain dilihat dari sisi penerima manfaat kelompok miskin, juga dari penerima manfaat non-miskin untuk melihat perannya dalam menjangkau kelompok miskin, sejauh mana mampu mengangkat kondisi mereka terhindar dari kemiskinan dan keluar dari ketidakberdayaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan meliputi statistik distribusi frekuensi dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 155 responden yang tersebar di dua wilayah kecamatan sampel, yaitu Kecamatan Bulu dan Kaliore yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Kecamatan Bulu mewakili perdesaan di wilayah

selatan, sedangkan Kaliori mewakili perdesaan di wilayah pesisir Rembang. Penerima manfaat pemberdayaan ekonomi terdiri dari 2 strata yaitu kelompok miskin dan non miskin. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak berstrata (*stratified random sampling*):

$$n = \frac{N(Z)^2 p(1-p)}{N(d)^2 + (Z)^2 p(1-p)}$$

(Sumber: Sugiarto, et.al: 2001)

dengan,  $n$  = jumlah sampel  
 $N$  = jumlah populasi  
 $Z$  = nilai reliabilitas (80% - 100%)  
 $d$  = maksimal nilai error (0,1)  
 $p$  = asumsi rasio populasi yang diambil untuk sampel ( $\geq 20\%$ )

**TABEL 1**  
**KERANGKA SAMPEL PENELITIAN**

No.	Kecamatan	Populasi	Sampel		
			Miskin	Non-miskin	Jumlah
1	Bulu	765	39	36	75
2	Kaliori	773	51	29	80

Sumber: Perhitungan Penulis, 2015

## GAMBARAN UMUM

### Kondisi Fisik Wilayah dan Aktivitas Perekonomian

Kabupaten Rembang terletak di sebelah utara bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah dengan topografi yang sangat lengkap yaitu daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Dengan luas wilayah 1014,08 km<sup>2</sup> diapit Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah selatan.

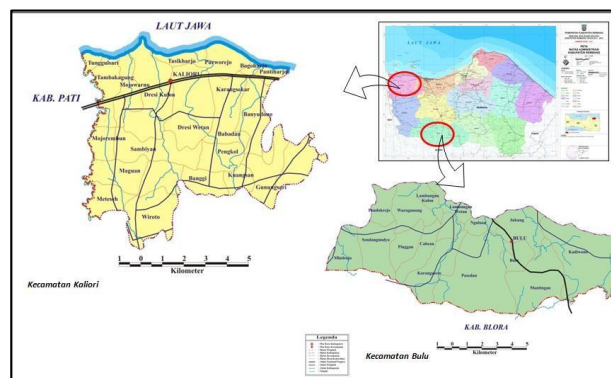
- Utara : Laut Jawa
- Barat : Kabupaten Pati
- Timur : Kabupaten Tuban
- Selatan : Kabupaten Blora

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan dengan wilayah sebagian linier di sepanjang jalur pantai utara. Selain itu, karakteristik dominasi lahan pertanian juga menegaskan secara umum bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang masih mencirikan wilayah perdesaan.

Wilayah Kecamatan Bulu didominasi oleh aktivitas khas perdesaan yaitu pertanian (basah dan kering), serta kehutanan. Sedangkan, tambak garam dan ikan menjadi ciri khas perdesaan yang berada di bagian pesisir, dimana yang paling banyak adalah di Kecamatan Kaliori. Walaupun, sektor pertanian menyumbangkan nilai yang paling banyak dalam PDRB Kabupaten Rembang, nyatanya tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan penduduk di perdesaan.

## Kependudukan dan Kemiskinan

Dari data BPS, di Jawa Tengah pada akhir tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 5.255 jiwa atau sekitar 16,21%. Yang mana komposisi penduduk miskin tersebut lebih dari setengahnya berada di wilayah perdesaan. Adapun, di Kabupaten Rembang jumlah kepala rumah tangga pada tahun 2013 tercatat sebanyak 191.003, dengan prosentase 53% adalah keluarga pra sejahtera. Jumlah keluarga miskin yang paling tinggi di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Bulu yaitu 75,2%. Dengan aktivitas penduduk di Kecamatan Bulu yang sebagian besar merupakan petani, buruh/ serabutan, maupun aktifitas ekonomi yang berhubungan erat dengan pertanian dan tegalan. Sementara itu, untuk wilayah kecamatan yang berada di pesisir pantai Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi 50,7%.



Sumber: Pengolahan Data, 2016

**GAMBAR 1**  
**WILAYAH KEMISKINAN TERTINGGI DI KABUPATEN REMBANG**

### Pemberdayaan Ekonomi Produktif di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Kaliori

Pemberdayaan ekonomi produktif yang dijadikan alat penelitian ini adalah kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan. Di Kabupaten Rembang ada 12 kecamatan yang dikategorikan kecamatan perdesaan sehingga mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, termasuk Kecamatan Bulu dan Kaliori. Program pemberdayaan ekonomi ini merupakan kegiatan yang memberikan tambahan modal usaha diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja yang mendorong pengurangan rumah tangga miskin. Meskipun, pada Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013 tidak ada alokasi untuk kegiatan ekonomi bantuan simpan pinjam modal lagi, tetapi kegiatan pemberdayaan ekonomi terus bergulir.

## KAJIAN LITERATUR

### Pembangunan Perdesaan dan Kemiskinan

Menurut Adisasmita (2013: 20), kebijaksanaan pembangunan perdesaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah kepada tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah kepada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. Peningkatan penyediaan sarana kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, peningkatan produktivitas dan pendapatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Misalnya, Jaminan Pengaman Sosial (JPS), peraturan yang melindungi kegiatan usaha penduduk miskin, jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang lebih memihak keluarga miskin.

Dalam pembangunan perdesaan, kemiskinan memang menjadi permasalahan dan tantangan yang cukup berat. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar minimum (Kuncoro, 2006). Dalam penelitiannya Murnizam dan Webley (2011), menyatakan ada beberapa tanggapan terkait penyebab kemiskinan yang dapat dikategorikan sebagai faktor individual, struktural, serta faktor lain (seperti umur, geografi dan lahan, motivasi).

### **Pemberdayaan Ekonomi sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Pemberdayaan ekonomi produktif ini biasanya dilakukan dalam bentuk kredit mikro khusus untuk warga miskin. Tanpa syarat agunan, warga miskin dapat memperoleh pinjaman untuk mendukung usaha untuk mencari nafkah meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin, yang paling penting, terdapat pola hubungan didalam kegiatan simpan pinjam perempuan dengan nasabahnya yang nantinya akan mempengaruhi perubahan kondisi kesejahteraan. Ada dua kemungkinan, yaitu pola hubungan yang tercipta akan mempermudah dan membantu rumah tangga miskin keluar dari kondisi sulitnya. Sebaliknya, atau justru mempersulit rumah tangga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik.

Contoh berhasil dari praktek pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi khususnya oleh perempuan adalah Bank Grameen (“grameen” berarti perdesaan) di Bangladesh. Konsep dari Bank Grameen inilah yang coba diadopsi oleh kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif PNPM Mandiri Perdesaan melalui Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP). Dengan adanya sistem lembaga penyedia keuangan yang memudahkan dan tidak memberatkan nasabah, warga miskin terutama dari kaum perempuan dapat mengakses pinjaman modal untuk mulai atau mendukung usahanya dalam membantu mengangkat kesejahteraan keluarganya.

## **ANALISIS**

### **Analisis Profil Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Produktif**

Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi produktif ini lebih didominasi oleh kelompok warga non miskin. Prasyarat 70% rumah tangga miskin hanya dilaksanakan saat berlangsungnya program saja, pada perkembangannya diprioritaskan yang memiliki usaha dan kemampuan mengembalikan

pinjaman. Rumah tangga miskin sebagai sasaran program pemberdayaan ekonomi produktif belum bisa mengikuti program karena mereka tidak mempunyai usaha atau termasuk tidak produktif.

Penerima manfaat juga didominasi oleh usia produktif (41-59 tahun) baik pada kelompok miskin maupun non miskin. Karena memang pada rentang usia tersebut merupakan puncak produktifitas mendorong para penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Tingkat pendidikan terakhir penerima manfaat pemberdayaan ekonomi produktif terutama dari kelompok miskin hanya sampai pendidikan dasar dan menengah pertama. Keterbatasan wawasan dan ketrampilan ini mempengaruhi performa mereka dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarganya. Mata pencaharian kelompok miskin penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi sebagian besar bekerja di bidang perdagangan mikro/ kecil serta sebagai buruh yang tidak memerlukan ketrampilan khusus.



Sumber: Pengolahan Data, 2016

## GAMBAR 2 MATA PENCAHARIAN SEBAGIAN BESAR PENERIMA MANFAAT KELOMPOK MISKIN

### **Analisis Pola Hubungan Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif dengan Penerima Manfaat**

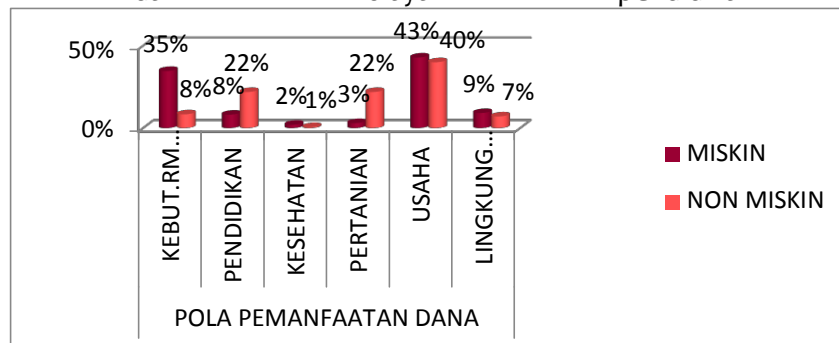
Pola hubungan program pemberdayaan ekonomi produktif dengan penerima manfaat salah satunya dilihat dari sistem pengajuan pinjaman secara berkelompok memiliki dua sisi baik dan buruk. Adanya kelompok akan meningkatkan nilai kepedulian sosial dalam masyarakat, bisa menghasilkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Modal pinjaman dari pemberdayaan ekonomi produktif (dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Mandiri Perdesaan sebagai alat penelitian) menunjukkan sebagian besar dikelola oleh penerima manfaat langsung (istri/ perempuan) baik untuk usaha maupun untuk kebutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan kuatnya prinsip bahwa perempuan lebih bijak dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dalam keluarga daripada laki-laki. Perempuan cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan rumah tangga (seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan keluarga) daripada lainnya.

Dilihat dari aspek pembinaan terhadap penerima manfaat, terlihat kurangnya pembinaan intensif terhadap penerima manfaat supaya usaha yang dijalankan bisa lebih berkembang dan lebih bisa melibatkan tenaga-tenaga kerja dari rumah tangga miskin. Selama ini pembinaan hanya sebatas pada administrasi kegiatan simpan pinjam pemberdayaan ekonomi. Pelatihan ketrampilan yang pernah dilakukan juga tidak terlalu efektif dan berkembang kelanjutannya.



### Analisis Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat

Pemberdayaan ekonomi produktif ini tidak hanya diberikan untuk rumah tangga miskin saja, tetapi juga rumah tangga non miskin. Bahkan, untuk rumah tangga miskin tidak menjangkau secara menyeluruh, melalui seleksi verifikasi hanya diperuntukkan bagi calon penerima manfaat dari rumah tangga miskin yang memiliki usaha atau minimal masih produktif. Walaupun pemanfaatannya terlihat bervariasi mulai dari untuk kebutuhan rumah tangga, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi pola pemanfaatan untuk modal usaha tetap terlihat mendominasi. Pola pemanfaatan dana dari pemberdayaan ekonomi produktif pada penerima manfaat kelompok miskin sebagian besar dipergunakan untuk modal usaha/ industri mikro serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan, bagi kelompok non miskin selain dominasi untuk modal usaha/ industri mikro digunakan untuk modal pertanian dan biaya pendidikan anak.



Sumber: Pengolahan Data, 2016

**GAMBAR 3**  
**POLA PEMANFAATAN PINJAMAN MODAL PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF**

Meskipun pengajuan pinjaman melalui kelompok, tetapi kemudian pemanfaatannya hampir semua digunakan untuk usaha individu (kepentingan rumah tangga sendiri). Hanya sebagian kecil dari penerima manfaat membentuk kelompok usaha bersama sesuai dengan potensi lokal, misalnya industri rumah tangga kerupuk ikan di Desa Tunggulsari serta kelompok usaha kupas rajungan di Desa Tambakagung dan Mojowarno Kecamatan Kaliori.



Industri Mikro Keripik Teri dan Kacang  
Desa Dresi Kulon Kec. Kaliori



Industri Mikro Pembuatan Tempe  
Desa Cabean Kec. Bulu



Usaha kelompok Kupas Rajungan  
Desa Tambakagung Kec. Kaliori  
Sumber: Survey Lapangan, 2016



Usaha kelompok Produk Kerupuk Ikan  
Desa Tunggulsari Kec. Kaliori

**GAMBAR 4**  
**USAHA MIKRO PENERIMA MANFAAT PEMBERDAYAAN EKONOMI**

Manfaat dari kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif di wilayah perdesaan ini sejauh mana memberikan perubahan dalam kondisi kesejahteraan penerima manfaatnya akan ditinjau dari berbagai aspek, yaitu pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan kesehatan.

#### a. Pekerjaan

Pada kelompok penerima manfaat rumah tangga miskin maupun non miskin, terjadi perubahan yang signifikan dimana para penerima manfaat yang memiliki usaha mikro/ rumah tangga mengalami peningkatan. Penerima manfaat kelompok miskin yang memiliki usaha meningkat dari 28% menjadi 67%, sedangkan penerima manfaat non miskin yang memiliki usaha meningkat dari 54% menjadi 79%.



Sumber: Survey Lapangan, 2016

### GAMBAR 5

#### USAHA YANG DIBANGUN MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF

#### b. Penghasilan

Manfaat terhadap penghasilan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu tercukupinya atau tidak kebutuhan harian dan mampu tidaknya menyisihkan tabungan keluarga. Penerima manfaat kelompok miskin yang semula kebutuhan hariannya kurang mencukupi dalam artian setiap harinya belum tentu ada penghasilan untuk dibelanjakan kebutuhan pokok atau ada bon di kios sembako setempat. Setelah adanya pemberdayaan ekonomi produktif, lebih banyak penerima manfaat yang tercukupi kebutuhan hariannya. Hal ini terkait dengan adanya perubahan pekerjaan atau pekerjaan sampingan/ usaha rumah tangga yang mereka kerjakan setelah memperoleh bantuan pinjaman modal dari pemberdayaan ekonomi yang menghasilkan tambahan pemasukan. Selain itu, jenis usaha yang berkembang menjadi usaha yang lebih besar, juga memberikan imbas terhadap penghasilan anggota kelompok penerima manfaat.

#### c. Pendidikan

Peningkatan penghasilan penerima manfaat juga memberikan imbas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan anak. Penerima manfaat yang semula sebelum adanya bantuan pemberdayaan ekonomi ini mereka hanya mampu menyekolahkan anak sampai dengan sekolah menengah pertama, setelah adanya PNPM Mandiri Perdesaan semakin banyak yang bisa menyekolahkan anaknya hingga menengah atas, bahkan jenjang pendidikan tinggi. Masyarakat mulai mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Bagi penerima manfaat dari kelompok miskin maupun non miskin menempatkan pendidikan anak sebagai salah satu kebutuhan pokok dengan mengutamakan pendidikan.

#### d. Kesehatan

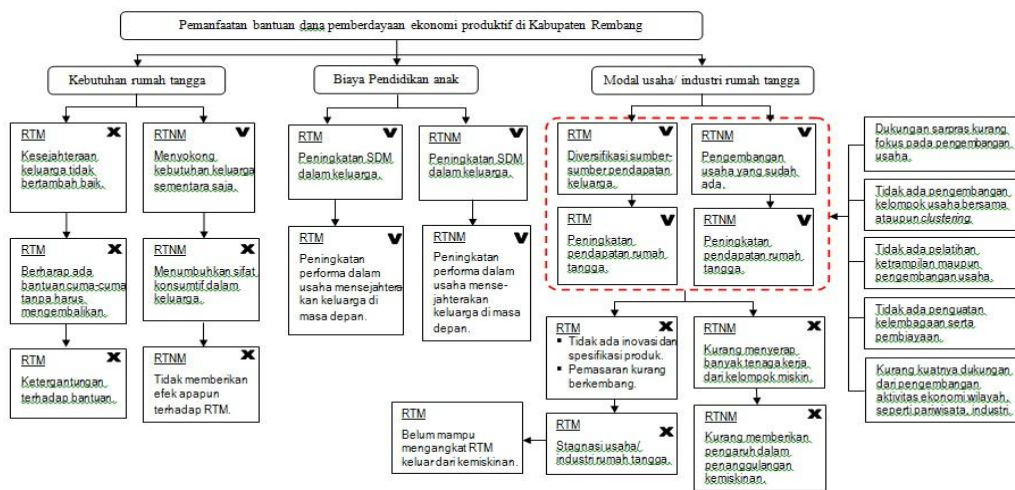
Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar rumah tangga yang menjadi tolok ukur kesejahteraan. Perbandingan sumber pembiayaan kesehatan penerima manfaat sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan ekonomi produktif PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan bahwa tidak ada perubahan sumber pembiayaan kesehatan. Artinya, penerima manfaat terutama kelompok miskin tidak memerlukan bantuan pinjaman dari pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat telah

memperoleh layanan kesehatan wajibnya, dengan adanya program-program kesehatan dari pemerintah. Kecuali, jika ada keperluan kesehatan yang tidak dapat terlayani dengan jaminan kesehatan dari pemerintah.

**Pola Hubungan dan Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang**

Dapat dikatakan secara efektifitas program pemberdayaan ekonomi produktif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang khususnya di wilayah perdesaan berhasil dalam memenuhi target capaian program. Misalnya, peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan kelompok perempuan, adanya peraturan keuangan mikro yang *pro poor* dan mudah pelaksanaannya, peningkatan lembaga kredit mikro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, yaitu adanya Unit Pengelola Kegiatan (UPK), serta terlembaganya sistem pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan hingga pengelolaan kelestarian program.

Namun, yang lebih utama disini adalah efisiensi program pemberdayaan ekonomi produktif ini dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang. Efisiensi pemberdayaan ekonomi dalam memberikan manfaat langsung seperti peningkatan pendapatan, kapasitas kelompok, jumlah usaha baru yang dapat dikembangkan melalui program sekaligus peningkatan produktifitas dan kompetensi usaha, serta peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan.



Sumber: Analisis, 2016

**GAMBAR 6**  
**DIAGRAM MANFAAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF TERHADAP**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN REMBANG**

Walaupun dapat dikatakan gagal dalam mengurangi kemiskinan, ada beberapa sisi positif dari implementasi pemberdayaan ekonomi produktif dalam penanggulangan kemiskinan. Selain manfaat langsung sebenarnya diharapkan ada manfaat tak langsung bagi penerima manfaat kelompok miskin melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat non miskin. Melalui akses ke dalam program pemberdayaan ekonomi produktif, kelompok non miskin diharapkan bisa menarik keluarga miskin dalam usaha yang dikembangkannya. Manfaat tak langsung dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan inilah yang belum tercipta di Kabupaten Rembang. Pelibatan tenaga kerja terutama yang berasal dari keluarga miskin sangat terbatas. Karena modal dan skala usaha yang juga terbatas, rata-rata usaha mereka kerjakan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain.

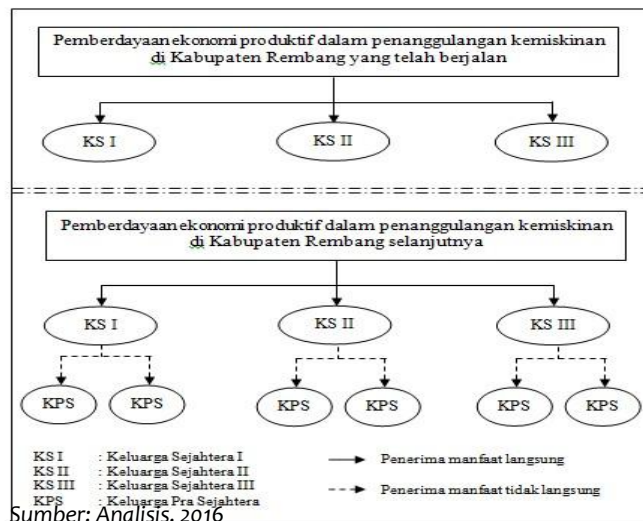
**Gagasan Pengembangan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang**

Ada beberapa hal dalam pola hubungan dan manfaat pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang yang menjadi pembelajaran untuk pengembangan program penanggulangan kemiskinan selanjutnya di wilayah ini. Adanya pergeseran kelompok penerima manfaat (*impact group*) dan kurangnya program dukungan menjadi hal utama yang menyebabkan program pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang cenderung kurang berhasil dalam mengurangi kemiskinan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, program pemberdayaan ekonomi produktif yang selama ini telah berjalan di Kabupaten Rembang memberikan manfaat langsung sebagian besar untuk kelompok keluarga Sejahtera I, II, dan III.

Sementara itu, untuk pemberdayaan ekonomi selanjutnya agar misi pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan Kabupaten Rembang dapat terwujud, penerima manfaat langsung (Keluarga Sejahtera I, II, III) harus dapat ikut mengangkat keluarga miskin (prasejahtera) untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berikut bagan gagasan pergeseran penerima manfaat pemberdayaan ekonomi produktif:

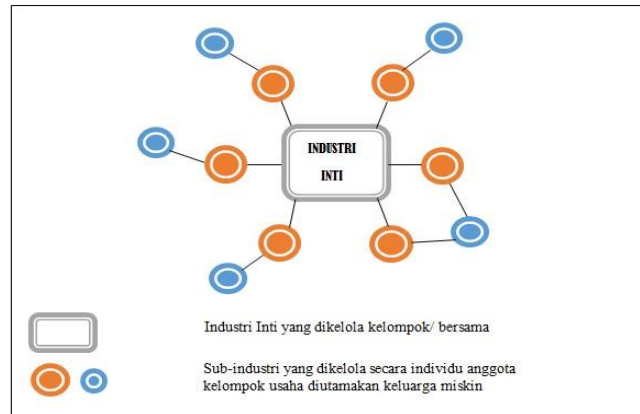


**GAMBAR 7**  
**BAGAN PERGESERAN PENERIMA MANFAAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF YANG TELAH BERJALAN DAN PROGRAM SELANJUTNYA**

Program lanjutan sangat diperlukan seperti dukungan sarana dan prasarana yang fokus pada pengembangan usaha, pembentukan klaster atau kelompok usaha bersama memungkinkan usaha mikro ini menjadi kuat terutama dalam produksi dan pemasarannya.

Usaha bersama bagi kelompok penerima manfaat yang melibatkan setiap anggota kelompok terutama anggota miskin, dapat dikembangkan dengan skema satu usaha/ industri kecil/ menengah sebagai intinya yang disokong oleh sub-sub industri yang dijalankan oleh tiap-tiap anggota kelompok. Sub-sub industri tersebut dapat berada pada proses produksi maupun pemasaran.

Berikut skema usaha bersama yang dapat dikembangkan bagi kelompok penerima manfaat pemberdayaan ekonomi:



Sumber: Analisis, 2016

**GAMBAR 8**  
**SKEMA USAHA BERSAMA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT**  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF**

Program dukungan yang lain adalah adanya pembinaan kelompok mulai dari pembinaan peningkatan motivasi untuk berwirausaha, hingga pelatihan-pelatihan ketrampilan yang memiliki spesifikasi karakteristik lokal Kabupaten Rembang. Yang terakhir, namun juga tidak kalah pentingnya pengembangan aktivitas ekonomi wilayah seperti pariwisata atau industri yang menjadi faktor penarik orang untuk datang ke wilayah Kabupaten Rembang akan memacu kelompok-kelompok penerima manfaat pemberdayaan ekonomi untuk berwirausaha dan memperluas jangkauan industri mikro yang mereka lakukan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai manfaat pemberdayaan ekonomi produktif terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan Kabupaten Rembang, diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang kurang mampu menjangkau pada tujuan penanggulangan kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi ini juga tidak bisa dijadikan alat utama dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan, khususnya di Kabupaten Rembang. Hal ini dikarenakan pada perkembangan program, sebagian besar penerima manfaat justru berasal dari kelompok non miskin. Usaha-usaha yang dimiliki oleh penerima manfaat non miskin tersebut juga kurang dapat menyerap tenaga dari keluarga miskin.

Sementara itu, karena berbagai kendala yang muncul, seperti kurang efektifnya pengembangan kapasitas masyarakat yang berkaitan dengan pengupayaan peningkatan ekonomi/ kesejahteraan serta kurang memadainya dukungan/ fasilitasi yang mengakibatkan tetap terpinggirkannya usaha/ industri mikro dari kelompok miskin. Namun demikian, sisi positif dari program pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang ini sebagai penyeimbang perekonomian keluarga miskin. Meski tidak serta merta dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan, setidaknya bisa mencegah mereka terperosok lebih jauh dalam kemiskinan.

Berikut merupakan rekomendasi dari penelitian ini:

- a) Adanya indikasi kurang berkembangnya usaha/ industri mikro penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi ini, perlu kerjasama dari Pemerintah dan UPK untuk



- memfasilitasi terbentuknya jaringan kerja (channeling) yang lebih luas semua stakeholder pembangunan untuk menjamin keberlanjutan usaha/ industri mikro yang dijalankan penerima manfaat.
- b) Usaha bersama bagi kelompok penerima manfaat yang melibatkan setiap anggota kelompok terutama anggota miskin dengan karakteristiknya, dapat dikembangkan dengan skema satu usaha/ industri kecil/ menengah sebagai intinya yang disokong oleh sub-sub industri yang dijalankan oleh tiap-tiap anggota kelompok. Sub-sub industri tersebut dapat berada pada proses produksi maupun pemasaran.
  - c) Usaha yang dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi ini haruslah yang lebih *pro-job* (lebih banyak menyerap tenaga kerja) dan *pro-poor* atau *pro-the poor* (bisa mengurangi kemiskinan).
  - d) Peningkatan pemberdayaan ekonomi pada kelompok penerima manfaat yang terbukti bagus kinerja dan track record-nya, tidak hanya memberikan insentif dalam lingkup perguliran saja melainkan melalui upaya-upaya kemitraan/ jejaring sosial ekonomi yang dapat mendukung pengembangan usaha.
  - e) Selanjutnya, diperlukan komitmen kebijaksanaan melalui peran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam merumuskan dan merealisasikan APBD sebagai wujud tanggungjawab sosial pemerintah daerah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Rembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmata, Raharjo. 2006. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2013. Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agussalim. 2009. Mereduksi Kemiskinan: Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia. Jakarta: Nala Cipta Litera.
- Arsyad, Lincoln. 1997. Ekonomi Pembangunan. Edisi ketiga. Yogyakarta: STIE- YKPN.
- Bernasek, Alexandra. 2003. Banking on Social Change: Grameen Bank Lending to Women. International Journal of Politics, Culture, and Society. Volume 16, No.3, Spring 2003.
- Gibson, James L. 2000. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga.
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halik, Murnizam and Webley, Paul. 2011. Adolescents' Understanding of Poverty and the Poor in Rural Malaysia. Journal of Economic Psychology. Volume 32, Issue 2, March 2011, Pages 231–239.
- Ivanovich, Augusta. 2014. Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Paradigmatik Sejak Pra Kolonial. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kamus Tata Ruang. 1997. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN RPJMD Jawa Tengah.
- Liyana Apriyanti. 2011. Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM

- Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010). Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mubyarto. 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dalam Era Otonomi Daerah. Artikel - Th. I - No. 9 – November 2002. <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 2 September 2015
- Munir, Badrul. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Badan Penerbit Bappeda NTB.
- Narayan, Deepa. 2002. Empowerment and Poverty Reduction. Washington DC : The World Bank.
- Rahim, Manat; Madjiani Tahir; dan Waly Aya Rumbia. Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Fakultas Ekonomi, Universitas Haluoleo Jln. H.E.A Mokodompit No. 1, Malaka Anduonohu, Kota Kendari. Journal The WINNERS, Vol. 15 No. 1, Maret 2014: 23-33.
- Romus, Mahendra & Nurlasera. 2013. "Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Proses Pemberdayaan Ekonomi pada Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sani, M.Y. 2000. Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan. Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS. Makassar.
- Selinger, Evan. 2008. Does Microcredit Empower? Reflections on the Grameen Bank Debate. Hum Stud (2008) 31:27-41 DOI 10.1007/s107446-007-9076-3. Published online 23 January 2008. Springer Science+Business Media B.V.
- Sugiarto, et.al. 2001. Teknik Sampling. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT.Rineka Aditama.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sutiyo and Maharjan, Keshav Lall. 2011. Rural Poverty Alleviation in Indonesia: Programs and the Implementation Gap. Journal of Development and Cooperation Vol. 18 No.1 2011.
- Tavanti, Marco. 2012. Before Microfinance: The Social Value of Microsavings in Vincentian Poverty ReductionJ Bus Ethics (2013) 112:697–706. DOI 10.1007/s10551-012-1566-1. Published online: 27 November 2012. Springer Science+Business Media Dordrecht.
- Tikson, Deddy T. 2001. Community Development. PPs-UNHAS. Makassar.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Diakses 20 Juli 2015.
- Winahyuningsih, Panca. 2007. Hubungan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur dengan Kemiskinan di Kabupaten Rembang. Analisis Manajemen Vol. 1 No. 2 Juli 2007. ISSN: 1411-1799.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. Negara vs Kaum Miskin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

